

## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## Izin Komersial/Operasional Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Badan Hukum (**selain PT, Yayasan dan Koperasi**) PKBM

WIJAYA KUSUMA

Nomor Induk Berusaha : 0282010030913

Alamat Perusahaan : DS. HADIWARNO RT 04 RW 01

Lokasi Usaha

a. Alamat : DS. HADIWARNO RT 04 RW 01 MEJOBO KUDUS

b. Desa/Kelurahan : Hadiwarno

c. Kecamatan : Mejobo

d. Kabupaten/Kota : Kab. Kudus

e. Provinsi : Jawa Tengah

Izin Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Kudus terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 11 Januari 2021 Oleh : Bupati Kab. Kudus



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal: 18 Januari 2021





## KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0006509.AH.01.07.TAHUN 2016 TENTANG

## PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN PKBM WIJAYA KUSUMA

## MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ADHI YULISTIANTO, SH , sesuai salinan Akta Nomor 127 Tanggal 11 Januari 2016 yang dibuat oleh ADHI YULISTIANTO, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PKBM WIJAYA KUSUMA tanggal 15 Januari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016011533105171 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PKBM WIJAYA KUSUMA;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

**KESATU** 

: Memberikan pengesahan badan hukum:

PERKUMPULAN PKBM WIJAYA KUSUMA

Berkedudukan di KABUPATEN KUDUS, sesuai salinan Akta Nomor 127 Tanggal 11 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris ADHI YULISTIANTO, SH yang berkedudukan di

KABUPATEN KUDUS.

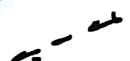
KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA PIt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,





DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 Januari 2016





## LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0006509.AH.01.07.TAHUN 2016 / TENTANG

## PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN PKBM WIJAYA KUSUMA

## MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

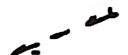
### 1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN	
HERDI HANTORO	3319051202830002	PENGURUS	KETUA	
ANDIKA BOBY PERKASA	3319052305920002	PENGURUS	SEKRETARIS	
LARAS KARNASIH	3319055208690002	PENGURUS	BENDAHARA	
EKO AGUS SETIAWAN	3319053003770001	PENGAWAS	KETUA	

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA PIt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,





DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 Januari 2016





#### KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR AHU-0000726.AH.01.08.TAHUN 2020 **TENTANG**

#### PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN PERKUMPULAN PKBM WIJAYA KUSUMA

#### Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SURYANTO,SH , sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 03 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris SURYANTO,SH tentang Perubahan Badan Hukum PERKUMPULAN PKBM WIJAYA KUSUMA tanggal 07 Agustus 2020 dengan Nomor Pendaftaran 6020080733200031 telah sesuai dengan persyaratan persetujuan Perubahan Badan Hukum PERKUMPULAN;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum PERKUMPULAN PKBM WIJAYA KUSUMA;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar : Mengenai Kepengurusan

PERKUMPULAN PKBM WIJAYA KUSUMA NPWP: 313796542506000

berkedudukan di KABUPATEN KUDUS karena telah sesual dengan Data Format Islan Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 03 Agustus 2020 yang dibuat oleh

Notaris SURYANTO, SH yang berkedudukan di KABUPATEN KUDUS.

**KEDUA** 

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JÉNDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Agustus 2020.



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 07 Agustus 2020



# LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR AHU-0000726.AH.01.08.TAHUN 2020 TENTANG DERSETUUJAN BERUBAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN

## PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN PERKUMPULAN PKBM WIJAYA KUSUMA

Susunan Pengurus dan Pengawas

Nama •	No. KTP/Passport	Organ Perkumpulan	15.50	Jabatan
ANDIKA BOBY PERKASA	3319052305920002	PENGURUS _	KETUA	
HERDI HANTORO	3319051202830002	PENGURUS	SEKRETARIS	
LARAS KARNASIH	3319055208690002	PENGURUS	BENDAHARA	
RUSMANTO	3319050601610002	PENGAWAS	KETUA	

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Agustus 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 07 Agustus 2020